KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0069623.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPRIANTO,SH , sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh SUPRIANTO,SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI tanggal 04 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016080436100563 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI
Berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris SUPRIANTO,SH yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0069623.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUHAMMAD FIRDAUS OIBOWO,SH	367.101.070776.0004	PENGURUS	KETUA UMUM
BAMBANG SUSETIANTO, SIP	320.113.201052.0002	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
YULIANTI WIWIT WULANDARI	367.505.410980.1001	PENGURUS	BENDAHARA
SARTONO T. MBA	321.704.120357.0009	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PEMBINA
M. BADRU TAMAM. MA	320.213.090673.0005	PENGAWAS	WAKIL KETUA DEWAN PEMBINA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2016

Dipindai dengan CamScanner